

## **Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Aceh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (Studi Pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh)**

### *Effect of Administration of Aceh's Property on the Quality of the Aceh Government's Financial Statements (Study of the Aceh Archives and Library)*

**Eliana<sup>1</sup>, Nurhayati<sup>2</sup>, Muhammad<sup>3</sup>**

a,b,c STIES Banda Aceh, Jln Prada Utama, Banda Aceh 23116, Indonesia

[1eliana@stiesabang.ac.id](mailto:eliana@stiesabang.ac.id) ; [2nurhayati@stiesabang.ac.id](mailto:nurhayati@stiesabang.ac.id) ; [3muhammad@stiesabang.ac.id](mailto:muhammad@stiesabang.ac.id)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penatausahaan barang milik negara terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Aceh dengan studi Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatip, yaitu hubungan atau pengaruh variable penata usahaan barang milik negara dengan variabel kualitas laporan keuangan populasi penelitian ini sebanyak 37 orang responden, dengan menggunakan metode sensus. Analisa data dilakukan dengan menggunakan regresi linier sederhana dengan alat bantu analisis melalui SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penata Usahaan Barang Milik Aceh berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dengan studi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

**KataKunci:** Penatausahaan Barang Milik Aceh, Kualitas Laporan Keuangan

#### **Abstract**

This study aims to determine the effect of administration of state property on the quality of the Aceh Government's financial statements with a study of the Aceh Library and Archives Service. This study uses associative quantitative methods, namely the relationship or influence of the management of state property management variables with the variable quality of financial statements in this study population of 37 respondents, using the census method. Data analysis was performed using simple linear regression with analysis tools through SPSS 20. The results showed that the Management of Aceh's Owned Property had a positive effect on the quality of the Aceh Government's Financial Statements with the study of the Aceh Library and Archives Service.

**Keywords:** Administration of Aceh's Property, Financial Report Quality

## PENDAHULUAN

Dalam era reformasi ini disetiap negara sudah pasti membutuhkan pemeritahan yang bersih atau disebut juga *good governance*, termasuk Indonesia. Dengan bergulirnya otonomi daerah merupakan bagian hidup dari reformasi yang dilakukan oleh Pemeritah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yaitu melalui otonomi daerah. Untuk mewujudkan kinerja pemeritahan yang bersih ( *good government governace*) baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, maka pemerintah tersebut harus berupaya terus menerus melakukan perbaikan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara baik di pusat maupun daerah, salah satunya dengan menerbitkan peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Hal ini diperkuat dengan telah dilakukan reformasi manajemen baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan menetapkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang –undang nomor 1 tahun 20014 tentang perbendaharaan Negara yaitu peraturan perudang-undangan yang menyatakan bahwa Pemerintah pusat, Gubernur/Bupati dan Pemerintah Kota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja melalui laporan keuangan berkualitas yakni laporan keuangan yang mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara, jujur dan terbuka serta mudah dipahami oleh publik, karena kegiatan pemerintah adalah melaksanakan amanat rakyat. Disamping itu, untuk mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemeritahan, yang isinya bertujuan yaitu : (a) Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang relevan, antara lain: memiliki umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap (b) Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang andal, antara lain : penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas (c) Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang dapat dibandingkan (d) Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang dapat dipahami. (Bastian, 2014:118)

Selain itu, hal yang penting dan mendasar dari penerapan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas adalah, salah satunya ditentukan atau dipengaruhi penata usahaan barang milik negara karena penata usahaan barang milik

pemerintah memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan pemerintah khususnya neraca yaitu berkaitan dengan pos-pos aset lancar, aset tetap, maupun aset lainnya. (Bastian, 2009:123). Menurut Siregar (2004:518) kegiatan pengelolaan barang milik daerah terdiri dari lima tahapan yaitu : 1). Inventarisasi aset; 2). Legal audit; 3). Penilaian aset; 4). Pengendalian dan pengawasan. Permendagri No.17 Tahun 2007, tentang penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permendagri No. 13 Tahun 2006, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah.

Dari peraturan tersebut sebagai wujud pedoman pengelolaan barang milik negara secara umum bagi instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu pengelolaan keuangan tersebut adalah Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh sebagai unit unsur Pemerintah Aceh, yang dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 14 Tahun 2013, dan berkedudukan di Kota Banda Aceh. Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh adalah unsur pendukung Pemerintah Aceh dibidang Arsip dan Perpustakaan.

Tugas pokok Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dalam pengelolaan Barang Milik Aceh adalah melaksanakan Penatausahaan Barang Milik Aceh (BMA), yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan sebagaimana pasal 26 Qanun 14 Tahun 2013. Barang milik Aceh dimaksud Barang Milik Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBA atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yaitu diperoleh dari hibah/sumbangan bila dalam negeri maupun luar negeri, diperoleh dari hasil pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan, bahwa masih terjadi kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh masih rendah atau belum optimal. Hal ini dapat dilihat hasil audit BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2014, dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Tetapi ditahun 2017 dan tahun 2018 sudah mendapatkan opini WTP (wajar tanpa Pengecualian) bukan berarti bahwa laporan pemerintah Aceh sudah optimal, masih banyak temuan BPK yang kegiatan pemerintahan aceh yang belum selesai dikerjakan salah satunya adalah temuan kelebihan pembayaran dan klaim jaminan pelaksana belum diterima atas pekerjaan pembangunan Gedung *Oncology Centre* pada Rumah Sakit

Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA), dan juga temuan penyerapan Dana Otonomi Khusus (Otsus) se-Aceh Tahun Anggaran 2017 tidak optimal dan pengelolaan sisa dana otsus alokasi Pemerintah Aceh tidak sesuai Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2013. (www.serambiindonesia, 23/5/2018).

Hal itu diperkuat hasil wawancara dengan salah seorang petugas Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh mengatakan bahwa penatausahaan barang milik Aceh pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh belum sepenuhnya berjalan dengan baik, masih ada kekurangan antara lain pelaksanaan inventarisasi belum optimal, pencatatan aset yang belum akurat dan belum seluruh aset Aceh diberikan kode pencatatan dan dilaporkan, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sehingga dapat dirumuskan permasalahan Apakah Penatausahaan barang milik Aceh berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh. Dengan tujuan penelitian ini adalah Sejauh mana penatausahaan barang milik Aceh berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh

### **Penelitian terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniatio, et al (2017) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh penatausahaan barang milik daerah yang terdiri dari kompetensi SDM, instrumen penatausahaan BMD, dan pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada pemerintah Kabupaten Magelang). Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah 65 orang yang terlibat dalam penatausahaan barang milik daerah dan laporan keuangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan survey yang diperoleh dengan cara pembagian kuisisioner kepada para responden. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier sederhana dengan software SPSS 23. dengan hasil Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara penatausahaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadi S (2013) yang berjudul Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Sumatera Selatan, dengan hasil yang didapat bahwa Penatausahaan Barang Milik Negara belum berfungsi secara optimal pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu, diantaranya banyak barang milik Negara yang belum dicatat, hal yang sama dijelaskan oleh Yanti, W. (2012) dengan judul Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Kewajaran Informasi Keuangan, dengan hasil

yang didapat bahwa Penatausahaan Aset Tetap berpengaruh positif terhadap laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap kewajaran informasi keuangan.

Ho : Penatausahaan Barang Milik Aceh (BMA tidak berpengaruh Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Aceh (studi Pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh).

Ha : Penatausahaan Barang Milik Aceh berpengaruh Terhadap kualitas laporan Keuangan Pemerintah Aceh. (studi Pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh).

## METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dilingkungan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh yang berjumlah 161 orang. Adapun jumlah sasaran populasi dapat dijadikan sasaran populasi adalah 37 pegawai yang dilihat pada table 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Sasaran Populasi

No	Populasi	Responden
1.	Sekretaris	1
2.	Kabag Pengelolaan Asset	3
3.	Kasie	8
4.	Staf (Golongan III)	25
Jumlah Responden		37

Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh 2018 (diolah)

Sehubungan populasi sasaran berjumlah relative kecil, maka metode penentuan sampel dalam penelitian ini digunakan metode sampel jenuh atau sensus yaitu populasi sasaran yang berjumlah 72 orang/responden, yaitu semua elemen populasi ikut diteliti (Sugiyono, 2014:156). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui kuesioner yang disebarkan pada tempat penelitian.. kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya dan akan responden jawab. Kuesioner harus dilakukan terlebih dahulu uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya juga dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolineeritas dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2015). Analisis regresi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dengan bentuk persamaan  $Y = \alpha + \beta X + e$  dimana Y adalah kualitas laporan keuangan,  $\alpha$  adalah konstanta,  $\beta$  adalah koefisien regresi, X adalah penatausahaan barang milik aceh dan e adalah error term.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian adalah Dinas perpustakaan dan Kearsipan Aceh yang telah menjadi sasaran dari penelitian ini berjumlah 37 responden dengan karakteristik sebagai berikut :

Tabel 2 Karakteristik Responden

No	Karakteristik Responden	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin:		
	Pria	25 orang	68 %
	Wanita	12 Orang	32 %
2	Usia		
	30-40	20 Orang	54 %
	41-50	10 Orang	27 %
	51>	7 Orang	19 %
3	Pendidikan		
	SMA	17 Orang	46 %
	D3	10 Orang	27 %
	S1	10 Orang	27 %
	S2	-	-

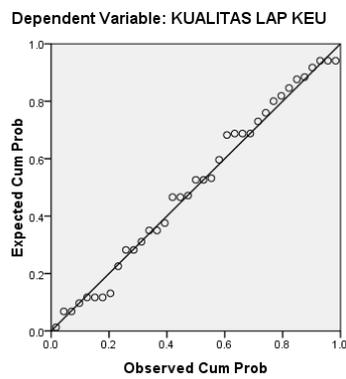
Sumber data Primer (diolah)

Pengujian data statistic deskriptif dapat dilihat di table 3 menunjukkan bahwa Nilai *mean* kualitas lapoan keuangan sebesar 3.7489. Ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah relative baik 3.7489 relatif baik. Nilai mean penatausahaan barang milik Aceh sebesar 3.4873. Hal ini mengindikasikan bahwa penataan usahaan barang milik Aceh cukup baik yaitu 3.4873 skala liket. Semakin tinggi tingkat standar deviasinya maka akan semakin heterogenitas, yang berarti pernyataan dalam kuesioner masing masing variabel tersebut semakin bervariasi. Artinya semakin rendah tingkat standar deviasinya maka semakin homogen artinya bahwa variasi jawaban atau pernyataan semakin kecil

Hasil uji Validitas dapat dilihat pada table 4 menunjukkan bahwa koefisien korelasi yang diperoleh masing-masing item dari variabel penatausahaan barang milik Aceh dan kualitas laporan keuangan berada diatas nilai kritis korelasi product moment (koefisien korelasi  $> 0.325$ , sehingga kuesioner yang digunakan dinyatakan valid. Berdasarkan reliability terlihat bahwa nilai koefisien *alpha cronbach* untuk masing-masing variabel yang ada di table 5 adalah 0.50. Dengan demikian pengukuran reliabilitas terhadap variabel penelitian menunjukkan bahwa pengukuran keandalan memenuhi kredibilitas *Cronbach Alpha* dimana nilai alphanya sama atau lebih besar dari Alpha 0.50, (Malhotra, 2005 : 305). Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang dijadikan sebagai alat ukur dalam penelitian ini sangat baik dan layak untuk digunakan.

Tampilan grafik normal *probability plot* pada gambar 1 dibawah ini menunjukkan bahwa titik-titik (data) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti atau mendekati arah garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model-model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

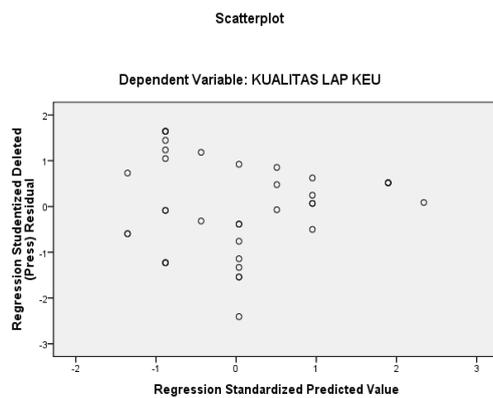
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



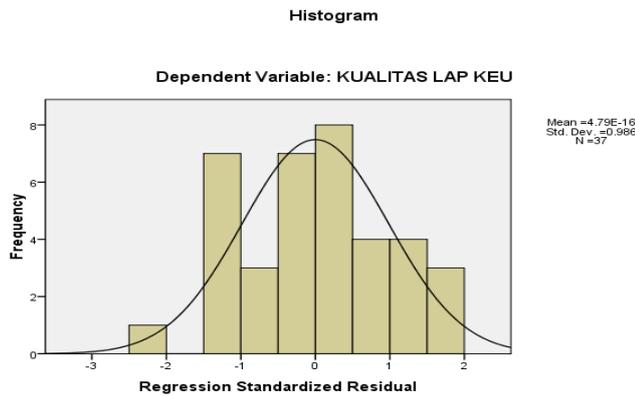
Gambar 1 Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji heterokedasititas tersebut bahwa penyebaran titik tidak ada membentuk pola yang jelas serta titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedasititas. Hal ini juga didukung dengan tampilan grafik histogram yang ditunjukkan didalam gambar dibawah ini:

Gambar 2 Diagram Scatterplot



Gambar 3 Histogram



Hasil Pengujian Regresi dapat dilihat pada table 6 berikut ini

Tabel 6 Pengaruh Variabel independen terhadap Variabel Dependen

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.329	1.101		.299	.007
	PENTUSHAAN BMN	.981	.314	.467	3.121	.004

a. Dependent Variable: KUALITAS LAP KEU

Persamaan regresi sederhana adalah  $Y = 0.329 + 0.981X + e$ . Berdasarkan persamaan regresi dapat diketahui hasil penelitian sebagai berikut : nilai konstanta sebesar 0.329 . Artinya bilamana faktor penataan usaha barang milik Aceh tetap, maka kualitas laporan keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, mengalami kenaikan sebesar 0.329 .

Koefisien regresi penatanaan barang milik Negara(b) sebesar 0.981 , yang berarti koefisien regresi yang diperoleh tidak sama dengan nol ( $b_1 \neq 0$ ). Artinya setiap satuan perubahan dalam penataan usaha barang milik Aceh akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sebesar 0.981 asumsi faktor konstanta tetap.

Hasil Uji Koefisien korelasi dan Deteminasi dapat dilihat pada table 7 berikut ini

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.567 <sup>a</sup>	.618	.195	.67872	.618	9.740	1	35	.004	.302

a. Predictors: (Constant), PENTUSHAAN BMN

b. Dependent Variable: KUALITAS LAP KEU

Berdasarkan Tabel 7 di atas diinterpretasi sbb : a) diperoleh nilai koefisien korelasi (R) : 0,567 dan R Square = 0.618. Menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh penatausahaan barang milik Aceh sebesar 0.618 atau 61%. Sementara sisanya dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. b) *Standar error of the estimate* = 0. 67872 lebih kecil dari standar deviasi = 0. 75663 Ini berarti regresi layak digunakan.

Hasil pengujian dilihat dari table 6 menunjukkan bahwa nilai koefisien X sebesar 0.981, artinya penataan usaha barang milik Aceh berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Jadi  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$  karena  $0.981 \neq 0$ . yaitu setiap terjadi peningkatan penatausahaan barang milik Aceh akan menaikkan kualitas laporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh jadi terjadi pengaruh positif antara penatausahaan barang milik Aceh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh melalui laporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dan pengaruhnya positif, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis determinasi model summary adalah R Squares sebesar 0.618 atau 61.8 % (di atas 50 % ). Jadi pengaruh penatausahaan barang milik Aceh adalah positif dan signifikan, karena R Squares sebesar 0.618 atau 61.8 % (di atas 50 % ).

Makna lain yang terkandung dari hasil analisa ini adalah bahwa setiap terjadi penilaian kembali atau penyesuaian harga barang milik Aceh setiap tahun, maka akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu nilai laporan keuangan akan lebih wajar dan sesuai dengan akuntansi IFRS yang saat ini telah diterapkan di Indonesia. Disamping itu, hal ini menunjukkan bahwa pencatatan dan laporan asset barang milik Aceh menunjukkan bahwa pelaksanaan *good governance* di Instansi Pemerintah Aceh khusus Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sudah berjalan dengan baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniato et al (2017) dan juga Yanti W (2012) yang menyatakan bahwa penatausahaan barang milik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah.

## KESIMPULAN

Terdapat pengaruh positif penatausahaan barang milik Aceh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh, ini dapat dilihat Hasil uji  $t_{hitung} = 3.121 > \text{tabel } (2,3363)$ . Hal ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya terjadi peningkatan penatausahaan barang milik Aceh yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dan Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Aceh

## SARAN

Disarankan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, untuk mempertahankan dan meningkatkan penatausahaan barang milik Aceh terutama penyesuaian harga setiap tahun, pencatatan kekayaan yang baik dan benar, guna meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh. Dan juga memberikan kesempatan kepada pegawai yang menangani barang milik Aceh untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan beban tanggungjawabnya melalui pendidikan dan pelatihan khusus Barang Milik Aceh. Disamping itu, pegawai yang menangaani penatausahaan barang milik Aceh adalah orang yang mempunyai pengalaman/background akuntansi

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian. Indra. (2014). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Salemba Empat: Jakarta.
- Ghozali, Imam. (2015). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kurnianto, Okta Dwi dkk. (2017). *Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Magelang)*. Skripsi universitas Hasanuddin.
- Peraturan Aceh Qanun Pemerintah Aceh Nomor 14 Tahun 2013 Tentang *Pengelolaan Barang Milik Aceh*, Penerbit Pemerintah Aceh, Banda Aceh.
- Rahmad, S. (2013). *Analisa Penatausahaan Barang Milik Negara Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Sumatera Selatan*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Negeri Palembang
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Siregar . (2004). *Pengaruh Inventarisasi dan Penilaian Asset Tetap Terhadap Penyajian Nilai wajar Neraca pada Pemerintahan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan*. Skripsi. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*, Alfabeta IKAPI, Bandung.

Yanti Ningsih, Willy. (2012). *Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Kewajaran Informasi Keuangan DPKA Kota Semarang*. Skripsi Fakultas Ekonomi UNDIP Negeri Semarang.

Tabel 3 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
KUALITAS LAP KEU	3.7489	.75663	37
PENTUSHAAN BMN	3.4873	.36004	37

Tabel 4 Uji Validitas

a. Variabel Penatausahaan Barang Milik Negara t (X)

Kode	Koefisien Korelasi ( $r_{hitung}$ )	Nilai Kritis ( $r_{tabel}$ )
B1	0.385	<b>0.325</b>
B2	.0429	<b>0.325</b>
B3	.0352	<b>0.325</b>
B4	.0388	<b>0.325</b>
B5	.0332	<b>0.325</b>
B6	.0578	<b>0.325</b>

b. Variabel Kualitas Laporan keuangan (Y)

Kode	Koefisien Korelasi ( $r_{hitung}$ )	Nilai Kritis ( $r_{tabel}$ )
B1	0.783	<b>0.325</b>
B2	0.880	<b>0.325</b>
B3	0.683	<b>0.325</b>
B4	0.687	<b>0.325</b>
B5	0.793	<b>0.325</b>
B6	0.836	<b>0.325</b>
B7	0.708	<b>0.325</b>
B8	0.718	<b>0.325</b>

Tabel 5 Uji Reliabilitas

No	Variabel	Rata-rata	Jmlh Item	Nilai Alpha	Keandalan
1	Penatausahaan barang Milik Negara t	21.4324	6	0.669	Handal
2	Kualaitas laporan keuangan	29.9730	8	0.929	Handal